

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA DI DESA GUBURINI KECAMATAN MAKKI KABUPATEN LANNY- JAYA

**ORINA KOGOYA
MARTHA OGOTAN
VERY Y LONDA**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Implementasi program beras sejahtera dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan publik dari Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Makki, Kepala Desa Guburini, Ketua BPD, Ketua Pokja Pelaksana Distribusi Rastra Desa Gurubuni, dan warga masyarakat penerima rastra. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Hubernann.

Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi dalam rangka implementasi program Rastra/Raskin di Desa Guburini dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Program Rastra/Raskin disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), oleh pemerintah desa, oleh BPD, dan oleh kelompok kerja pelaksana distribusi rastra Desa Guburini. Sumberdaya manusia pelaksana program rastra/raskin tersedia yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kelompok kerja pelaksana distribusi rastra/raskin, dan dibantu oleh aparat desa. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin disediakan biaya operasional pelaksanaan rastra/raskin. Disposisi atau sikap pelaksana sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan program. 4. Struktur birokrasi/organisasi dalam pelaksanaan program rastra/raskin sudah tertata dengan baik dilihat dari struktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan program rastra di desa yang sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis.

Kata Kunci : Implementasi, Program Rastra.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang jumlah penduduknya besar atau menempati urutan ke lima di dunia. Berdasarkan data Bappenas (2018) jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2017 mencapai 264 juta orang, dan diperkirakan pada akhir Tahun 2018 mencapai 265 juta orang yang terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.

Sebagai Negara sedang berkembang, Indonesia tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Meskipun berbagai

kebijakan/program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan dan dikembangkan sejak awal pembangunan berencana dilaksanakan, namun persoalan kemiskinan masih terus dialami oleh bangsa ini; dimana sampai dengan sekarang ini jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Menurut data BPS (2018) jumlah penduduk miskin Indonesia (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) pada September 2017 adalah sebanyak 26,58 juta orang (10,12%), yaitu di daerah perkotaan sebanyak

10,27 juta orang dan di perdesaan sebanyak 16,31 juta orang. Pada tahun 2018 (Maret 2018) penduduk miskin Indonesia masih sekitar 25,95 juta orang (9,82%) yaitu di perkotaan sebanyak 10,14 juta orang dan di perdesaan sebanyak 15,81 juta orang.

Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu mulai tahun 2007 dan terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, adalah Program Beras Miskin (Raskin) atau yang sekarang ini telah dirubah dengan sebutan Beras Sejahtera (Rastra), yaitu program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sementara manfaat dari raskin/rastra antara lain adanya peningkatan ketahanan pangan di tingkat RTS, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan bagi RTS-PM, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran, menjaga stok pangan nasional, juga membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka implementasi program Rastra tersebut maka dibentuk organisasi pelaksana mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Di tingkat Pusat dibentuk Tim Koordinasi Pusat yang diketuai oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di tingkat Provinsi di bentuk Tim Koordinasi Propinsi yang diketuai oleh Gubernur, ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan yang diketui oleh Camat dan dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra. Selanjutnya, di tingkat Desa dibentuk Pelaksana atau

Kelompok Kerja Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra yaitu kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana program Raskin/Rastra di Desa. Selain organisasi pelaksana, pemerintah juga menetapkan pelaksanaan penyaluran, yaitu : (1) Pelaksana penyaluran sampai ke titik distribusi (TD) adalah BULOG; (2) Pelaksana penyaluran dari TD ke titik bagi (TB) adalah pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; (3) Penyaluran dari TB ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) adalah pelaksana distribusi raskin/rastra di desa yaitu kelompok kerja (pokmas) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Meskipun organisasi pelaksana dan penyaluran bantuan Rastra sudah ditetapkan dengan jelas, namun pelaksanaan program ini masih terdapat permasalahan, terutama di tingkat desa antara lain di Desa/Kampung Gurubuni Kecamatan/Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Papua. Berdasarkan data yang diperoleh, di Kecamatan/Distrik Makki terdapat Rumah Tangga Miskin sebanyak 3.643 KK atau sekitar 64,35% dari 5.659 KK yng ada di Kecamatan/Distrik Makki, dimana sebagian diantaranya berada di Desa/Kampung Guburini. Dari prasarvei yang dilakukan di Desa/Kampung Guburini, nampaknya ada beberapa permasalahan dalam implementasi program Raskin/Rastra, yaitu : (1) Salah Sasaran. Masih ditemukan adanya penerima bantuan Raskin/Rastra yang tidak/kurang pantas karena bukan rumah tangga miskin, dan sebaliknya justru ada rumah tangga miskin tidak dimasukkan sebagai penerima bantuan Raskin/Rastra. Hal demikian data terjadi karena pendataan keluarga miskin oleh pemerintah desa/kampung atau petugas yang ditunjuk adalah tidak akurat, dan juga masih adanya praktek nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas pelaksana di desa yaitu sengaja memberikan Kupon Rastra kepada keluarga, kerabat dan teman dekat. (2) Ukuran Rastra yang diterima tidak lagi sesuai

dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15 kg per Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) per bulan. Sesuai Juknis bahwa ukuran beras yang disalurkan oleh BULOG adalah 15 Kg per karung/zak, sehingga setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) akan mendapat 1 karung/zak (ukuran 15 Kg). Namun dalam pelaksanaannya beras Raskin/Rastra yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM) tidak lagi 15 Kg, karena sengaja dikurangi oleh pemerintah desa/pelaksana distribusi dengan alasan untuk diberikan kepada warga lainnya, sehingga jumlah masyarakat yang menerima bantuan Raskin/Rastra akan lebih banyak termasuk masyarakat bukan pemegang Kartu RTS-RM. (3) Ketidak-tepatan waktu penyaluran atau sering terlambat dari waktu yang sudah ditentukan sesuai pedoman pelaksanaan/juknis.

Implementasi program Rastra di tingkat desa perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga mitra pemerintah desa (BPD, LPM) dan juga perlu dukungan partisipasi masyarakat desa setempat. Sehingga itu program Rastra harus dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait tersebut, namun dari informasi yang diperoleh nampaknya komunikasi/sosialisasi program Rastra belum maksimal dilaksanakan di Desa/Kampung Guburini, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami. Akibat kurang komunikasi/sosialisasi ini ada masyarakat yang tidak miskin justru menuntut diberikan bantuan Rastra. Selain itu karena masyarakat kurang/tidak memahami program Rastra ini maka mereka menerima saja apa yang dilakukan oleh kepala desa atau para pelaksana walaupun sebenarnya ada ketidaksesuaian ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan.

Implementasi program Rastra juga harus didukung oleh ketersediaan SDM aparat dan pelaksana di desa yang memadai terutama

dari segi kualitas. Dari data awal yang diperoleh kualitas SDM aparat desa dan pelaksana program Rastra yang ditunjuk oleh kepala desa di Desa Guburini belum memadai dilihat dari kemampuan pengetahuan dan keterampilan karena berpendidikan rendah, dan kurang kecakapan dan pengalaman di bidang pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Aparat Desa dan pelaksana program Rastra di Desa juga harus punya disposisi (komitmen dan konsisten) untuk melaksanakan program ini dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lemahnya komitmen dan konsistensi aparat desa dan para pelaksana dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan program Rastra di Desa.

Selain itu, implementasi program Rastra perlu adanya mekanisme pelaksanaan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten, namun demikian meskipun mekanisme dan prosedur pelaksanaan program Rastra di Desa sudah ditetapkan secara jelas di dalam Juknis, pelaksanaannya masih sering kurang sesuai/tepat.

Beberapa permasalahan tersebut dapat menunjukkan implementasi program Rastra di Desa Guburini masih banyak kelemahan dan ada indikasi belum optimal berjalan baik. Namun kelemahan atau masalah tersebut masih perlu dibuktikan dengan melalui penelitian ilmiah, sehingga tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya Papua”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Moleong, 2009).

Penggunaan metode deskriptif-kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini ingin mengetahui dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi program Raskin/Rastra di tingkat pelaksana di Desa. Selain itu, dengan metode ini diharapkan dapat menemukan dan memahami apa realita di balik fenomena implementasi program Raskin/Rastra di Desa.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah implementasi program beras miskin atau beras sejahtera (Raskin/Rastra) di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya Papua, yang diamati dalam empat dimensi implementasi kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/organisasi. Dimensi-dimensi tersebut secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, dilihat dari:
(1) komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Raskin/Rastra di Desa (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan Kelompok Kerja atau Pokja Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra); dan (2) Sosialisasi Program Raskin/Rastra kepada masyarakat desa.
- b. Sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang disediakan untuk pelaksanaan program Raskin/Rastra.

- c. Disposisi, yaitu komitmen, konsistensi, kejujuran, dan tingkat demokrasi dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin/Rastra di Desa.
- d. Struktur birokrasi, yaitu mekanisme/prosedur pelaksanaan dan penyaluran Raskin/Rastra, dan susunan organisasi pelaksana di Desa.

Informan Penelitian

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih mementingkan content, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal.

Informan dalam penelitian ini diambil dari semua unsur/pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin/Rastra di Desa, kelompok sasaran program Raskin/Rastra yaitu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RM), tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Desa Guburini. Jumlah seluruh informan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 8 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) : 1 orang;
2. Kepala Desa : 1 orang;
3. Ketua BPD : 1 orang;
4. Ketua Pokja Pelaksana Distribusi Raskin : 1 orang;
5. RTS-RM (Penerima Bantuan Beras Raskin/Rastra) : 4 orang;

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode/teknik kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan : (1)

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Wawancara (Interview). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari para informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terpimpin (interview guide) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan lebih dahulu, dan wawancara mendalam (indepth interview).
- b. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan dan pendistribusian Program Raskin/Rastra. Data observasi akan melengkapi data primer hasil wawancara.
- c. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di kantor Kepala Desa, pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Makki, atau pada Pokja Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa Guburini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2009). Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (data collection), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (data reduction), selanjutnya penyajian data (data display), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification).

Langkah-langkah proses analisis kualitatif model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (data collection); pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui teknik wawancara dan dibantu dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.
2. Reduksi data (data reduction); yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
3. Penyajian data (data display); dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa dekripsi data suatu obyek.

PEMBAHASAN

Hasil wawancara di atas sudah menggambarkan bagaimana implementasi program Rastra di Desa Guburini Kecamatan/Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan/program yang dikemukakan oleh Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/organisasi. Untuk memberi makna terhadap hasil

penelitian tersebut dilakukan pembahasan seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi:

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III dalam Nugroho, (2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi yaitu cara informasi disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten penyampaian informasi itu.

Pada penelitian ini dimensi komunikasi dilihat dari bagaimana Program Rastra dikomunikasikan kepada semua pihak terkait terutama kepada masyarakat umum dan lebih khusus masyarakat miskin yang merupakan sasaran dari program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam rangka implementasi program Rastra dilaksanakan dengan cukup baik dan cukup efektif. Program Rastra disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang turun langsung ke masyarakat maupun oleh pemerintah desa setempat.

Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa implementasi program

raskin/rastra di Desa Guburini sudah cukup baik dilihat dari dimensi komunikasi.

2. Sumberdaya (resources)

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan/program tidak akan efektif apabila para implementor/pelaksana kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan/program; Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan/program termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia untuk pelaksanaan program rastra/raskin di tingkat desa tersedia dengan mencukupi. Di tingkat kecamatan ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya. Kemudian, di tingkat desa dibentuk kelompok kerja (Pokja) pelaksana distribusi rastra/raskin yang dibentuk oleh pemerintah desa/kampung. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin di desa disediakan dalam bentuk biaya operasional pelaksanaan.

Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa sumberdaya manusia dan finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin di Desa Guburini sudah cukup baik.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana):

Menurut Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III disposisi (disposition) merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa komitmen tim pokja dan aparat desa untuk melaksanakan program rastra/raskin dengan baik dan efektif sudah cukup tinggi dilihat dari kesungguhan dan semangat kerja. Konsistensi tim pokja dan aparat desa dalam melaksanakan program rastra/raskin dengan baik dan efektif juga cukup tinggi dilihat dari ketaatan mereka melaksanakan program ini sesuai dengan juknis yang ada. Kejujuran pegawai juga sudah baik yang ditunjukkan oleh tidak adanya kasus-kasus penyimpangan atau penyelewengan/penyimpangan dalam pelaksanaan dan distribusi rastra/raskin.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan

terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja. Standar prosedur pelaksanaan atau standard operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline kebijakan/program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang didesain secara ringkas, tidak berbelit dan bersifat fleksibel, serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat mencegah terjadinya ketimpangan tugas dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan/program.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan program rastra/raskin dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan rastra/raskin yang ditetapkan oleh pemerintah/kementerian sosial. Struktur organisasi dan pembagian kerja untuk pelaksanaan program raskin/rastra sudah ditetapkan dengan jelas sesuai juknis yaitu dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) pelaksana distribusi rastra/raskin di desa. Ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi program rastra/raskin di Desa Guburini sudah cukup baik dilihat dari dimensi struktur birokrasi/organisasi.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa implementasi program rastra/raskin di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya dapat dikatakan sudah cukup baik dilihat dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pegawai, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi program Rastra/Raskin pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil

penelitian ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam rangka implementasi program Rastra/Raskin di Desa Guburini dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Program Rastra/Raskin disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), oleh pemerintah desa, oleh BPD, dan oleh tim kelompok kerja (Pokja) pelaksana distribusi rastra/raskin Desa Guburini. yang turun langsung ke masyarakat maupun melalui kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat.
2. Sumberdaya manusia pelaksana program rastra/raskin tersedia yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kelompok kerja pelaksana distribusi rastra/raskin, dan dibantu oleh aparat desa. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin disediakan oleh pemerintah berupa biaya operasional pelaksanaan rastra/raskin.
3. Disposisi (sikap petugas dan aparat desa) dalam melaksanakan program rastra/raskin sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan program sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada.
4. Struktur birokrasi/organisasi dalam pelaksanaan program rastra/raskin sudah tertata dengan baik dilihat dari struktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan program rastra/raskin di desa yang sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis (juknis) yang ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Komunikasi dan sosialisasi tentang program rastra hendaknya lebih banyak dilakukan secara langsung kepada

masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan baik.

2. Kualitas sumberdaya pelaksana program rastra di Desa Guburini terutama aparat desa perlu ditingkatkan.
3. Konsisten dan komitmen pelaksana program rastra di Desa Guburini perlu ditingkatkan.
4. Prosedur pelaksanaan program rastra yang sudah ditentukan dalam juknis rastra harus dilaksanakan dengan baik dan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. 2002, Pengantar Analisis Kebijakan, terjemahan, Yogyakarta : UGM Press.
- Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gava Media.
- Keban, J. 2008, Enam Dimensi Strategis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Isu, Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (Anggota IKAPI).
- Nugroho, R. 2009. Public Policy : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta Gramedia
- Ritonga, 2003. Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Suparlan, 2004. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta : Yayasan Obor.
- Suharto, Edi. 2004. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Subarsoso,A.G. 2005. Analisis Kebijakan Public :Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tjokrowinoto, M. 2001, Pembangunan : Konsep, Dilema, Tantangan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar

World Bank, 2008. Conditional Cash Transfers in Indonesia. Program Keluarga Harapan and PNPM-Generasi Baseline Survey Report, June 2008

Winarno, Budi. (2016) Kebijakan Publik di Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif, Yogyakarta: CAPS.

Sumber Lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
Tentang Ketahanan Pangan

Keputusan Menteri Sosial No.21 Tahun 2017
tentang Penetapan Jumlah PKM Rastra
dan BPNT Tahun 2017.

Buku Kecamatan/Distrik Makki Dalam
Angka, Tahun 2018.